



## Dampak Persaingan Suku Jawa dan Masyarakat Lokal pada Penguasaan Tempat Strategis di Wisata Kuliner Oepoi

Bernardus Donggo Raga<sup>1</sup>, Yohanes Kornelius Ethelbert<sup>2\*</sup>,  
Yasinta Palan Peten<sup>3</sup>, Karolus Tatu Sius<sup>4</sup>, Hendrikus Likusina Kaha<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, 85369

### ARTICLE INFO

---

Article history:

Received 09/07/2024

Revised 05/08/2024

Accepted 06/08/2024

---

### Abstract

*Based on data from BPS as of February 2023, from Lifetime Migration (100 Population) in Kupang City, it was recorded that 35.96 were data on residents who migrated into Kupang City, and the net migration figure which reached 33.8 proves that many immigrants from outside Kupang City who want to live and live their lives in Kupang City, including the Javanese who have migrated to Kupang City since the Dutch colonial period in the 19th century. This research aims to examine the theory of gentrification and its relevance in the migration of Javanese to NTT, especially the city. Kupang on the Oepoi Culinary Tour. The method used in this research is a quantitative verification method by testing the truth of theoretical assumptions with data in the field. The results of the research prove that the arrival of Javanese immigrants resulted in changes in terms of demographics, development aesthetics, employment opportunities, social controversy and an increase in property prices. The development of Oepoi Culinary Tourism is correct in arranging the relevant locations to make them look neater, but it must be accompanied by the readiness of the local community in terms of human resources to welcome competition with Javanese people in the culinary world.*

**Keywords:** *Gentrification, Migration, Javanese Ethnic*

### Abstrak

Berdasarkan data BPS Per-Februari 2023 dalam Migrasi Seumur Hidup (100 Penduduk) di Kota Kupang, tercatat sebanyak 35,96 adalah data penduduk yang melakukan migrasi masuk ke Kota Kupang, dan angka migrasi netonya yang menyentuh angka 33,8 membuktikan bahwa banyak pendatang dari luar Kota Kupang yang ingin tinggal dan menjalani hidup di Kota Kupang, termasuk Suku Jawa yang sudah sejak periode kolonial Belanda melakukan migrasi ke Kota Kupang di abad 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori gentrifikasi dan relevansinya dalam migrasi suku Jawa ke NTT khususnya Kota Kupang pada Wisata Kuliner Oepoi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif verifikatif dengan menguji kebenaran asumsi teori dengan data di lapangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kedatangan pendatang dari suku Jawa mengakibatkan perubahan-perubahan dari segi demografis, estetika pembangunan, pengadaan lapangan pekerjaan, kontroversi sosial dan peningkatan harga property. Pembangunan Wisata Kuliner Oepoi sudah benar untuk menata lokasi terkait agar terlihat lebih rapi, namun harus disertai dengan kesiapan masyarakat lokal dalam hal SDM untuk menyambut persaingan dengan masyarakat dari Suku Jawa di dunia perkulineran.



**Kata Kunci:** Gentrifikasi, Migrasi, Suku Jawa

\*Penulis Korespondensi

E-mail : ethgatus@unwira.ac.id

## PENDAHULUAN

Wisata kuliner Oepoi merupakan salah satu destinasi dominan warga di Kota Kupang. Pada mulanya lokasi ini adalah tempat Pedagang Kaki Lima (PKL). Demi meingkatkan animo wisatawan ke Kota Kupang, pemerintah menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi wisata kuliner. Serentak dengan itu adalah penataan tempat tersebut agar menjadi lebih permanen. Spanduk-spanduk iklan kemudian ditempatkan di depan lapak (Lawalu et al., 2023).

Pembangunan Wisata Kuliner Oepoi sebenarnya tidak terlepas dari keinginan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan lahan yang semulanya dibiarkan kosong dan tidak tertata menjadi tempat bagi para pedagang yang akan menyewa lahan tersebut dan membayarnya secara rutin pertahun. Selain untuk kepentingan penataan ruang kota, pengalihan fungsi pada Lokasi tersebut hamper mirip seperti apa yang dilakukan di Tanjung Tengah, Pematang Siantar (Anggraeni et al., 2019). Keinginan pemerintah tersebut sejalan dengan apa yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 pasal 3 ayat 5 tentang Peremajaan Lokasi PKL. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk melakukan peremajaan lokasi PKL akhirnya baru bisa terealisasi tepat di tahun 2017 setelah dianggarkan melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan sempat mengalami penolakan. Namun pemerintah provinsi melalui Dinas Pendapatan dan Aset Daerah melakukan penyuluhan bagi para PKL terkait prosedur penyewaan stan.

Pembangunan Wisata Kuliner Oepoi bertujuan untuk menyambut semangat modernitas dalam Kota Kupang sebagai Ibukota sekaligus

cerminan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa penelitian terdahulu menekankan bahwa pembangunan adalah langkah positif yang diambil oleh pihak pemerintah untuk menyambut semangat modernitas mengikuti arus perkembangan globalisasi. Salah satu penelitian yang menyetujui argumentasi ini adalah studi yang dilakukan oleh (Puteri & Rani, 2020). Mereka menunjukkan bahwa pembangunan memberikan efek positif selama mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, pada penelitian lain dikatakan bahwa pembangunan akan membawa dampak positif selama memegang teguh pada falsafah yang dimiliki Indonesia yakni UUD 1945 dan Pancasila (Aristo Evandy A. Barlian & Annisa D. Permata Herista, 2021).

Pembangunan lokasi Wisata Kuliner Oepoi sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, pembangunan yang dinilai positif ini juga bisa membawa dampak negatif. Salah satu teori yang melihat dampak negatif pembangunan adalah Gentrifikasi. Sisi negatif tersebut muncul ketika pembangunan terpaku pada pengertian pembangunan fisik belaka dan mengesampingkan pembangunan di sisi mental bagi masyarakat di suatu wilayah. Paham pembangunan dengan sifat demikian disebut sebagai *developmentalisme* (Syahra, 2010). Paham *developmentalisme* sendiri sebenarnya merupakan paham warisan Belanda yang mengedepankan pembangunan dengan menghiraukan efek samping berupa eksklusif sosial masyarakat sebagai akibat dari pembangunan suatu wilayah (Eko, 2021). Ironisnya lagi, paham inilah yang kemudian digunakan pemerintah dalam

pembangunan di daerah konflik agraria daerah Wadas (Sulaeman & Mustofa, 2022).

Pembangunan yang hanya mengutamakan pembangunan fisik dinilai lebih mudah sehingga lebih sering dilakukan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Medha Azka Nur & Anastita Putu Gde, 2017), dijelaskan bahwa pembangunan yang dipetakan secara serampangan akan membawa dampak negatif di lokasi terkait. Pembangunan harus melalui beberapa tahap verifikasi dan perencanaan yang berpedoman pada RCP secara matang. Hal ini pula yang seharusnya dilihat pada perencanaan pembangunan Wisata Kuliner Oepoi. Pembangunan yang dilakukan hanya ditujukan untuk peremajaan lokasi PKL, tanpa terlebih dahulu mempersiapkan pembangunan SDM masyarakat lokal yang berkualitas untuk bisa bersaing dengan para pendatang dari Suku Jawa sebenarnya jelas membawa dampak negatif dan tidak disarankan untuk dilakukan karena mengeksklusikan masyarakat lokal dari adanya pembangunan (Widianto & Keban, 2020). Namun, pemerintah tetap melakukan pembangunan tersebut dan meresmikannya pada tahun 2017 kemarin. Pihak pemerintah berpendapat bahwa gentrifikasi akan sangat membantu dalam proses pembangunan ruang/fisik, meskipun ada efek negatif lain yang bisa terjadi (Shin & Kim, 2016).

Gentrifikasi memiliki beberapa fokus. Beberapa fokus teori gentrifikasi yang kemudian termuat dalam penelitian ini adalah perubahan demografis, perubahan fisik dan estetika, peningkatan harga properti, konflik sosial antar masyarakat, dan lapangan pekerjaan (Widianto & Keban, 2020). Penelitian tentang dampak gentrifikasi di suatu wilayah belum banyak dikemukakan para peneliti sebelumnya. Banyak peneliti yang lebih memfokuskan penelitian mereka pada penyebab terjadinya gentrifikasi. Pada

penelitian yang dilakukan oleh (Hudalah et al., 2016) di daerah Bandung misalnya melihat bahwa gentrifikasi terjadi karena adanya proses perubahan yang cepat dalam demokratisasi dan desentralisasi yang melemahkan kekuasaan pemerintah dalam penguasaan lahan (Hudalah et al., 2016) (Hudalah et al., 2016) (11). Desentralisasi yang diterima oleh pihak pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari pemerintahan pusat menjadikan mereka memiliki hak penuh atas pengolahan dana dan pengaturan ruang daerah (Rukmana, 2015). Artinya, keputusan untuk membangun suatu lokasi Wisata Kuliner seperti Wisata Kuliner Oepoi merupakan kewenangan mereka sebagai pemilik kebijakan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan dengan subjek penelitiannya relasi antara Masyarakat Bugis dan Suku Atoin Pah Metoh (Tanesab & Tanesab, 2023) dikatakan bahwa suku asli Atoin Pah Metoh menerima dengan baik para pendatang dari Bugis, dan bahkan membantu mereka untuk berusaha dan memulai bisnis ekonomi mereka di tanah Timor. Selain itu, pada penelitian lain yang dilakukan dengan subjek penelitian yang sama, yakni pada masyarakat pendatang dari Suku Bugis (Bacotang, 2016), menunjukkan kedatangan para pendatang tersebut dinilai sebagai kelompok pembantu pendapatan perekonomian Kota Kupang. Moto hidup yang kuat yang sangat dijunjung tinggi masyarakat NTT termasuk dalamnya Kota Kupang yang memegang falsafah "*katong semua basodara*" menjadikan mereka sangat terbuka bagi pendatang manapun, tanpa melihat latar belakang suku, ras, agama, budaya maupun adat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya melihat konflik yang bisa terjadi di ruang lingkup masyarakat sebagai dampak dari gentrifikasi. Penelitian sebelumnya hanya mengkaji tentang kedatangan masyarakat pendatang yang dinilai

berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Kota Kupang. Padahal pada kenyataannya, kedatangan dari masyarakat pendatang dari luar daerah ini juga bisa menimbulkan jurang ketimpangan terkait permasalahan keadilan sosial seperti apa yang terjadi di Banyumas (Rizkidarajat et al., 2024).

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang terkesan lebih mengutamakan pembangunan fisik dalam kebijakannya ketimbang pembangunan dalam SDM yang akan dipergunakan dalam persaingan di dunia usaha kuliner di Wisata Kuliner Oepoi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Denzin, 1978) penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bersinggungan dengan aneka disiplin, bidang dan tema. Penelitian kualitatif dapat memberikan jawaban atas pertanyaan atas rumusan masalah yang sudah disusun penulis dalam penulisan penelitian ini. Penulis berusaha untuk membuktikan kebenaran bahwa keberadaan masyarakat poendatang dari Suku Jawa dan menguasai perdagangan di wilayah Wisata Kuliner Oepoi dapat menimbulkan masalah sosial untuk beberapa waktu ke depan.

Lokasi penelitian ini berpusat di wisata kuliner Oepoi dan berlangsung selama 2 bulan. Teknik pengumpulan data dalam penulisan riset ini adalah observasi langsung, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Observasi langsung dilakukan dengan datang ke lokasi penelitian dan melihat langsung situasi perdagangan yang terjadi di sana, wawancara dilakukan dengan mengambil sampel random di antara para pedagang dari suku Jawa dan masyarakat Timor di lokasi penelitian, dokumentasi akan dilakukan dengan cara mengambil foto dan video di lokasi penelitian, dan studi kepustakaan

dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang berkaitan dan penelitian-penelitian terdahulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Persebaran Suku Jawa di Kota Kupang**

Persebaran suku Jawa di Kota Kupang telah terjadi sejak masa kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Selain penduduk asli masyarakat Timor, terdapat banyak pendatang dari luar Kota Kupang yang memilih untuk tinggal dan mencari pekerjaan di Kupang. Para pendatang ini adalah orang-orang keturunan China, Arab, Bugis, Makassar, Buton, Bajo, dan Jawa serta beberapa suku bangsa lainnya dari berbagai daerah.

Pendatang dari Jawa kemudian diikuti oleh beberapa orang dari beberapa daerah di Sumatera, Sulawesi, Maluku pada umumnya datang ke Nusa Tenggara Timur karena kehidupan mereka sebagai pegawai negeri. Namun, dimulai dari tahun 1972 ada banyak gelombang pendatang dari Jawa yang tinggal di beberapa kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama Ende, Maumere dan Kupang (KEBUDAYAAN, 2007). Mereka datang sebagai tukang, buruh dan pedagang. Pedagang-pedagang dari Jawa kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kebanyakan berdagang makanan, membuka warung-warung, dan menjajakan makanan seperti Bakso, Bakmi, Soto, Es, Sate dan sebagainya.

Pengaruh Jawa sangat terlihat pada masa kejayaan Hindu di Nusantara. Pengaruh ini terjadi karena adanya hubungan politik dan dagang yang kuat dari Suku Jawa dengan suku-suku di luar Jawa. Pada tahun 1225 masyarakat dari pulau Timor telah mulai diutus ke Jawa. Pengaruh kebudayaan Jawa ini tampak di berbagai daerah dalam berbagai bentuk seperti mitos Majapahit di pulau Sabu dan Pantar dan Tarian Lendo Maja dan upacara untuk Majapahit di pulau

Sabu dan Raijua serta masih banyak lagi. Beberapa budaya yang ada ini kemudian dapat dilihat sebagai bukti sejarah bahwa hubungan atau relasi yang terjalin antara masyarakat NTT dengan masyarakat pendatang dari suku Jawa tidak terjadi dalam waktu yang relative singkat.

Jumlah penduduk NTT yang berasal dari suku Jawa berjumlah 54.511 dengan total presentase 01,17% dari 100% total keseluruhan masyarakat NTT berdasarkan data Sensus BPS 2010. Dari 100% total keseluruhan penduduk NTT sebanyak 18,82% dari keseluruhan itu adalah penduduk pendatang dari suku-suku luar NTT dan menempatkan suku Jawa sebagai suku dengan populasi terbanyak kedua setelah suku-suku dari Kalimantan. Hal ini membuktikan bahwa suku Jawa merupakan salah satu suku besar yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kemampuan SDM yang mumpuni dalam dunia perkulineran menjadikan banyak pendatang dari suku Jawa kemudian memilih untuk berkiprah dalam dunia bisnis makanan dan kuliner untuk menyambung hidup di NTT secara khusus kota Kupang. Persebaran mereka dalam berdagang dan memulai bisnis kulinerpun tidak terpusat hanya pada satu lokasi. Tercatat bahwa ada beberapa lokasi besar di Kota Kupang yang dijadikan sebagai base perdagangan kuliner masyarakat Jawa seperti Wisata Kuliner Seafood Solor dan Wisata Kuliner Oepoi.

Persaingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, dan persenjataan lainnya. Selain itu, persaingan dapat pula dilihat sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga sebagai upaya untuk mencapai tujuannya secara kompetitif (Ferdianto, 2016). Dalam konteks perdagangan, Adam Smith menyatakan pada bukunya yang berjudul *The Wealth*

*of Nations (1776)* bahwa persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi dan efisien (Smith, 2020). Persaingan dalam perdagangan memiliki kaitan dengan kompetisi para penjual yang sama-sama berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi dan promosi.

Wisata Kuliner Oepoi merupakan salah satu lokasi strategis yang dibangun oleh pemerintah Provinsi NTT untuk para pelaku UMKM yang ingin membuka usaha dagang kuliner mereka. Lokasi ini dibangun pada tahun pada tahun 2017 berdasarkan penganggaran pada rancangan APBD yang dianggarkan di tahun 2016 yang diajukan oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Pembangunan jejeran stan ini bertujuan untuk menata lokasi tersebut agar lebih rapi dan teratur.

Mayoritas para pedagang yang berjualan di Wisata Kuliner Oepoi adalah masyarakat pendatang dari suku Jawa. Di antara 32 stan yang sudah terisi dan disewa, terdapat 22 stan yang di sewa atas nama para pendatang dari suku Jawa yang berjualan di daerah tersebut (Wawancara Pak Sandy, 12 Juni 2024). Jadi sekitar 69% stan yang sudah terisi di Wisata Kuliner Oepoi disewa dengan menggunakan nama para pendatang dari Jawa. Sisanya 31% adalah para pelaku UMKM dari NTT sendiri.

### **Perubahan Demografis**

Perpindahan penduduk bisa terjadi karena ketakutan akan suatu ancaman ataupun harga sewa yang tidak bisa lagi terjangkau (Shaw, 2008). Gentrifikasi dapat mengakibatkan pengusiran penduduk berpendapatan rendah, dan perubahan dalam struktur demografi kawasan. Terjadi perubahan dalam komposisi penduduk, di mana penduduk berpenghasilan rendah digantikan oleh penduduk berpenghasilan tinggi. Ini seringkali didorong oleh peningkatan harga

property yang membuatnya tidak lagi terjangkau bagi penduduk asli.

Dalam sudut pandang antropologi, perubahan demografi dalam gentrifikasi dapat dipahami melalui analisis tentang bagaimana dinamika sosial, budaya, dan identitas berubah. Ketika suatu area mengalami gentrifikasi. Gentrifikasi seringkali melibatkan perubahan dalam komposisi penduduk, dengan mungkin terjadi peningkatan jumlah penduduk berpenghasilan tinggi dan pengusiran terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Penelitian dengan pendekatan antropologis dapat menyoroti bagaimana perubahan ini mempengaruhi struktur sosial dan identitas komunitas lokal, serta bagaimana mereka bereaksi terhadap perubahan tersebut.

Wisata Kuliner Oepoi yang dibangun di depan Gelanggang Olahraga Kota Kupang berdampak pada perubahan demografis di sekitaran wilayah yang tergentrifikasi. Berdasarkan hasil survey lokasi di sekitaran lokasi wilayah tersebut, peneliti menemukan banyak perubahan demografi yang terjadi akibat adanya pembangunan Wisata Kuliner Oepoi. Misalnya dengan dibangunnya salah satu SD berbasis Islamiah yakni SDIT Al-Muttaqin tepat di belakang Gelanggang Olahraga Kota Kupang yang berjarak 300 meter saja. SDIT ini dibangun pada tahun 2012 bulan Juli. Pada tahun yang sama, lokasi yang sekarang dibangun Wisata Kuliner Oepoi menjadi pusat perdagangan para pedagang kaki lima. Para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut mayoritasnya berasal dari para pendatang dari suku Jawa dan luar NTT. Menurut Freeman dalam analisis gentrifikasinya, pembangunan SDIT Al-Muttaqin ini diakibatkan karena gentrifikasi masyarakat Jawa yang berdagang dan membangun usaha di sekitaran lokasi tersebut. Karena melihat banyaknya para pedagang dari Jawa akhirnya dibangunlah SD berbasis Islamiah untuk memenuhi kebutuhan

pendidikan anak-anak dari para pedagang tersebut.

Meskipun terlihat sepele, namun hal ini bisa menjadi ancaman serius apabila tidak ditangani secara tepat oleh pihak pemerintah. Gentrifikasi dapat mengakibatkan hilangnya lingkungan tinggal yang nyaman akibat dari tergerusnya suatu lokasi sebagai sebuah dampak dari kekuatan kapitalisme (Blok, 2020). Gentrifikasi yang dilakukan secara serampangan akan membawa dampak buruk bagi lokasi terdampak dan para korban (Easton et al., 2020). Akibatnya, gentrifikasi yang terjadi membawa efek yang berbahaya berupa relokasi tak teratur dari pihak pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Helbrecht menegaskan bahwa gentrifikasi dapat membawa dampak buruk bagi korban yang *ter-displace* atau mengalami pemindahan akibat gentrifikasi (Helbrecht, 2017). Dampaknya mungkin tidak akan terasa sekarang, tapi akan terasa beberpa tahun ke depan seperti apa yang telah terjadi di Gedongtengen, Jogjakarta (Widianto & Keban, 2020).

### **Peningkatan Harga Properti**

Gentrifikasi seringkali dikaitkan dengan peningkatan harga property. Gentrifikasi membuat harga lahan di sekitar permukiman meningkat, sehingga tidak dapat dijangkau oleh kaum miskin kota (Murdie & Teixeira, 2011). Karena minat yang meningkat dari penduduk berpenghasilan tinggi, harga property di kawasan gentrifikasi cenderung meningkat secara signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan penggusuran penduduk asli yang tidak mampu lagi membayar sewa atau hipotek yang meningkat.

Antropologi melihat gentrifikasi sebagai proses kompleks yang melibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu wilayah, termasuk dampaknya terhadap harga property. Dalam "*Rethinking of Gentrification: Beyond The Uneven*

*Development of Marxist Urban Theory*” oleh (Rose, 1984), dikatakan bahwa gentrifikasi dapat menyebabkan peningkatan harga property yang dapat mengakibatkan pemaksaan keluar terhadap penduduk asli yang mungkin tidak mampu membayar harga tinggi tersebut.

Pada sekitaran lokasi penelitian yang terdampak gentrifikasi, harga sewa kos dan kontrak tinggal terbilang cukup mahal. Para pemilik kontrakan dan kos-kosan di sekitaran wilayah tersebut melihat peluang besar untuk berbisnis, sehingga harga sewa tinggal di sekitaran wilayah yang tergentrifikasi mengalami peningkatan ketimbang di awal-awal masa pembangunan wisata kuliner Oepoi pada tahun 2012.

### **Perubahan Fisik dan Estetika**

Pada kenyataannya, rehabilitasi mampu menghilangkan image kekumuhan dari sebuah permukiman (Atkinson, 2004). Gentrifikasi seringkali dikaitkan dengan renovasi bangunan dan pembangunan infrastruktur baru di kawasan yang terkena dampak. Kawasan yang mengalami gentrifikasi sering mengalami perubahan fisik, seperti renovasi bangunan, pembangunan tempat-tempat hiburan baru, dan perubahan tata letak jalan. Estetika kawasan juga dapat berubah menjadi lebih modern atau hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di lokasi penelitian, ibu Maria pemilik stan makan Mie Aan, beliau menyatakan bahwa pembangunan atau perubahan lingkungan fisik di sekitaran wilayah yang tergentrifikasi terbilang sangat lambat. Bahkan beliau sempat menjadi salah satu tokoh yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi untuk membangun lahan parkir di depan wilayah tersebut. Dengan adanya pembangunan lahan parkir tersebut setidaknya dapat sangat membantu meramaikan wilayah tersebut

dan membuat suasana depan wisata kuliner semakin rapi.

*“... Perubahan lingkungan fisik dengan adanya bangunan-bangunan baru mulai nampak terasa jelas saat masa 2014 silam, wah dulunya area disekitaran sini masih terbilang sangat sepi” (Wawancara Ibu Maria salah satu pelaku UMKM di lokasi, 17 Mei 2024).*

Dengan dibangunnya Wisata Kuliner Oepoi, setidaknya memperamai suasana di jalan W.J. Lalamentik. Selain itu, adanya pembangunan John’s Hotel yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tersebut pada tahun 2014 serta beberapa kos dan kontrakan turut meramaikan area tersebut karena menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai lokasi yang strategis untuk para pendatang yang hendak berlibur atau melakukan kompetisi olahraga di Kota Kupang.

### **Kontroversi Sosial**

Gentrifikasi seringkali menjadi topik kontroversial. Gentrifikasi dapat memicu konflik sosial antara penduduk lama dan penduduk baru, serta menimbulkan ketidaksetaraan sosial dalam akses terhadap layanan dan sumber daya (Atkinson, 2004).

Dalam gentrifikasi, konflik dapat terjadi apabila penduduk yang sebelumnya mendiami daerah tersebut menyalahkan pengguna produk gentrifikasi sebagai pihak yang menciptakan permasalahan bagi mereka. Selain dengan pengguna produk gentrifikasi, penduduk sebelumnya juga berkonflik dengan pemilik lahan yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Kontroversi sosial yang terjadi dalam gentrifikasi bergantung kepada dampak yang diberikan oleh pembangunan Wisata Kuliner Oepoi. Pada para pedagang dalam lokasi tersebut, konflik hampir tidak pernah terjadi karena para pedagang tidak merasa terganggu antara aktifitas

pedagang satu dengan pedagang lainnya. Konflik diyakini tidak akan terjadi, karena pembangunan wisata kuliner Oepoi dinilai sangat membantu para pedagang karena biaya sewa perstannya yang dinilai sangat murah bila dibandingkan dengan penyewaan di tempat lain. (Wawancara Ibu Maria, 17 Mei 2024).

Akan tetapi pada mulanya pembangunan ini memunculkan konflik antara para pelaku UMKM dengan pemerintah karena para pelaku UMKM tersebut merasa dirugikan dengan relokasi yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan Wisata Kuliner Oepoi yang sangat lama yakni memakan waktu 1 tahun lebih.

### Lapangan Pekerjaan

Byrne yakin bahwa gentrifikasi akan membawa pekerjaan bagi masyarakat miskin perkotaan (Byrne, 2003). Gentrifikasi secara umum selain dalam corak pariwisata juga dipandang akan menciptakan lapangan pekerjaan (Liang & Bao, 2015). Kemunculan Wisata Kuliner Oepoi sebagai produk gentrifikasi wisata kuliner di Oepoi memang benar telah membawa lapangan pekerjaan.

Para pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan mencari lahan sewa untuk membuka usaha bisnis kuliner mereka karena harga sewa dari pihak swasta di berbagai tempat yang mencapai harga Rp. 30.000.000, akhirnya dimudahkan dengan adanya pembangunan Wisata Kuliner Oepoi yang harga sewanya relative lebih murah dengan kisaran harga Rp.11.000.000 s/d Rp.15.000.000. (Wawancara Ibu Maria, 17 Mei 2024). Kesempatan untuk membuka usaha dagang di sana diberikan kepada siapapun yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk memulai bisnis kuliner mereka. Tidak ada pendiskriminasian yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pedagang jika ingin menyewa lapak di sana.

Namun, kehadiran bangunan Wisata Kuliner Oepoi juga bisa membawa pandangan negative dari sebagian besar masyarakat yang membuka peluang untuk terjadinya konflik. Hal ini karena para pedagang yang berjualan lebih banyak berasal dari masyarakat pendatang. Di sana mereka berjualan dengan menyewa lapak usaha, dan mencari pekerja dari masyarakat lokal sekitaran kota Kupang untuk bekerja dengan mereka.

*“ . . . Ngapain nyewa atau cari orang Jawa kalau para ada orang sekitar yang mau kerja, harga jasanya juga ndak terlalu mahal dan cukup telaten ”* (Wawancara Ibu Astuti pemilik stan Soelo, 17 Mei 2024).

Harga jasa yang ditawarkan dari para pembantu masyarakat lokal NTT terbilang cukup murah, namun hal ini diakui terpaksa dilakukan karena kondisi ekonomi yang terjepit dan memang membutuhkan lapangan pekerjaan di Kupang.

*“ . . . Gaji saya Rp. 1.500.000 perbulan. Saya bekerja untuk membiayai sekolah anak. Suami kerja serabutan. Rumah di Fatukoa, jauh dari tempat kerja, sehingga kadang diantar suami dan kadang saya naik ojek pulang pergi kerja ”* (Wawancara Ibu Yuliana Kelan, pembantu di stan Mie Aan, 17 Mei 2024).

Dirinya mengaku sempat berjualan nasi bungkus di Pasar Inpres sekitaran akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023, namun ditegur majikan lama dan disuruh kembali untuk membantu berjualan. Berdasarkan pengakuan narasumber juga tidak ada pelatihan atau pendidikan memasak dari dinas terkait selama masa kerjanya di Wisata Kuliner Oepoi, sehingga hal ini yang membuat dirinya tetap bekerja sebagai tenaga kerja di lokasi tersebut.

Akibatnya, meskipun pembangunan Wisata Kuliner Oepoi membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai tenaga kerja bantu di tiap stan yang dibuka, namun kerugian yang didapatkan juga terbilang besar. Hal ini karena pembangunan Wisata Kuliner Oepoi justru tidak berdampak besar bagi masyarakat lokal yang adalah penduduk asli. Pembangunan ini lebih berdampak pada masyarakat pendatang dari Jawa yang secara kemampuan sudah lebih baik dari masyarakat lokal dalam dunia usaha kuliner. Pembangunan Wisata Kuliner Oepoi dilihat tidak memiliki korelasi seimbang antara gentrifikasi dan relokasi warga terdampak yang dalam hal ini adalah masyarakat lokal (Zuk et al., 2018).

## KESIMPULAN

Pembangunan pusat ekonomi warga sejatinya harus bersifat inklusif bukan eksklusif. Pendekatan inklusif berupaya meredam potensi penolakan terutama kelompok masyarakat yang tidak mendapat manfaat langsung dari sebuah pembangunan. Dalam kasus pembangunan wisata kuliner Oepoi di Kupang, peneliti menemukan kehadiran pendatang dari Jawa yang bekerja sebagai pedagang kuliner telah mengakibatkan tergesernya warga lokal dari ruang wisata kuliner Oepoi. Hal ini tentu sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat berujung pada konflik pada level horisontal. Karena itu, berdasarkan hasil penelitian peneliti menyarankan agar pemerintah juga memberikan ruang bagi para pelaku kuliner lokal untuk bisa mengembangkan usaha pada tempat-tempat kuliner strategis di Kota Kupang.

## REFERENSI

Anggraeni, D., Fasya, T. K., & Nasution, A. A. (2019). Gentrifikasi Dan Pergolakan Lahan Di Kelurahan

Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. *Aceh Anthropological Journal*, 3(2), 144. <https://doi.org/10.29103/aaaj.v3i2.2778>

Aristo Evandy A.Barlian, & Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>

Atkinson, R. (2004). The evidence on the impact of gentrification: New lessons for the urban renaissance. *European Journal of Housing Policy*, 4(1), 107–131. <https://doi.org/10.1080/1461671042000215479>

Bacotang. (2016). *Migrasi Dan Perubahan Ekonomi (Analisis sosiologi tentang kontribusi enik Bugis bagi ekonomi kota Kupang)*.

Blok, A. (2020). Urban green gentrification in an unequal world of climate change. *Urban Studies*, 57(14), 2803–2816. <https://doi.org/10.1177/0042098019891050>

Byrne, J. P. (2003). *Scholarship @ Georgetown law two Cheers for Gentrification Two Cheers for Gentrification*. 432.

Denzin, N. K. (1978). *Sociological Methods: A Sourcebook*. McGraw-Hill.

Easton, S., Lees, L., Hubbard, P., & Tate, N. (2020). Measuring and mapping displacement: The problem of quantification in the battle against gentrification. *Urban Studies*, 57(2), 286–306. <https://doi.org/10.1177/0042098019851953>

Eko, S. (2021). Reclaiming the Government for the Sovereignty of the People. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan*

- Semesta), 2(2), 188–214. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.122>
- Ferdiyanto, A. S. (2016). *Persaingan usaha di lingkungan STAIN JURAI SIWO METRO perspektif etika bisnis islam*.
- Helbrecht, I. (2017). Gentrification and Resistance: Researching Displacement Processes and Adaption Strategies. In *Gentrification and Resistance: Researching Displacement Processes and Adaption Strategies* (Issue January 2018). <https://doi.org/10.1007/978-3-658-20388-7>
- Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2016). Gentrifying the peri-urban: Land use conflicts and institutional dynamics at the frontier of an Indonesian metropolis. *Urban Studies*, 53(3), 593–608. <https://doi.org/10.1177/0042098014557208>
- Kebudayaan, D. P. D. (2007). *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*. UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Lawalu, E. M., Ketmoen, A., & Taneo, B. (2023). *Volume 5 Nomor 2 Juni 2023 Hal 68-78 Model Pengembangan Usaha Wisata Kuliner Oepoi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang Oepoi Culinary Tourism Business Development Model During The Covid-19 Pandemic In Kupang City Volume 5 Nomor 2 Juni 2023 Hal 68-7. 5, 68–78*.
- Liang, Z. X., & Bao, J. G. (2015). Tourism gentrification in Shenzhen, China: causes and socio-spatial consequences. *Tourism Geographies*, 17(3), 461–481. <https://doi.org/10.1080/14616688.2014.1000954>
- Medha Azka Nur, & Anastita Putu Gde. (2017). Pandangan Terhadap Fenomena Gentrifikasi dan Hubungannya dengan Perencanaan Spasial. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 1337–3520.
- Murdie, R., & Teixeira, C. (2011). The impact of gentrification on ethnic neighbourhoods in toronto: A case study of little Portugal. *Urban Studies*, 48(1), 61–83. <https://doi.org/10.1177/0042098009360227>
- Puteri, R., & Rani, H. (2020). Analisis Paradigma Pembangunan Di Indonesia Analisis of Development Paradigm in Indonesian. *IJI Publication*, 1(1), 40–52.
- Rizkidarajat, W., Nabilla Arifputri, A., Ariyanti, M., Hanny Puspitaningtyas, I., & Hafizha, A. (2024). Gentrifikasi dan Ketimpangan Sosial di Kelurahan Pabuwaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.137>
- Rose, D. (1984). Rethinking gentrification: beyond the uneven development of Marxist urban theory. *Environment & Planning D: Society & Space*, 2(1), 47–74. <https://doi.org/10.1068/d020047>
- Rukmana, D. (2015). The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Suharto's New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. *International Planning Studies*, 20(4), 350–370. <https://doi.org/10.1080/13563475.2015.1008723>
- Shaw, K. (2008). A response to “The eviction of critical perspectives from gentrification research.” *International Journal of Urban and Regional Research*, 32(1), 192–194. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2008.00772.x>
- Shin, H. B., & Kim, S. H. (2016). The developmental state, speculative urbanisation and the politics of displacement in gentrifying Seoul.

- Urban Studies*, 53(3), 540–559.  
<https://doi.org/10.1177/0042098014565745>
- Smith, A. (2020). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*, 62–72.  
<https://doi.org/10.2307/2221259>
- Sulaeman, K. M., & Mustofa, M. U. (2022). Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi dalam Film Dokumenter “Wadas Waras” (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 21–42.
- Syakra, R. (2010). Eksklusi Sosial: Perspektif Baru untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat & Budaya, Edisi Khusus*, 1–33.
- Tanesab, K., & Tanesab, J. (2023). *METO ( Studi Sosiologis Di Desa Teun Baun Dan Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang ). 1(2)*.
- Widianto, H. W., & Keban, Y. T. (2020). Gentrifikasi: Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Hotel di Malioboro Kota Yogyakarta Gentrification: The Socio-Economic Impact of Hotel Development in Malioboro Areas, Yogyakarta City, Indonesia. *Jurnal PKS*, 19(2), 107–123.
- Zuk, M., Bierbaum, A. H., Chapple, K., Gorska, K., & Loukaitou-Sideris, A. (2018). Gentrification, Displacement, and the Role of Public Investment. *Journal of Planning Literature*, 33(1), 31–44.  
<https://doi.org/10.1177/0885412217716439>